LAMPIRAN Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kota Padang dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Padang
Nomor :
Tanggal :

**PEMERINTAH KOTA PADANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagaimana KUA yang mempunyai keterkaitan dengan RKPD, maka proses penyusunan PPAS Tahun 2019 merupakan bagian dari proses penyusunan perencanaan anggaran. Oleh karena itu, proses penyusunan PPAS Tahun 2019 merupakan bagian terpenting dalam proses penyusunan anggaran yang nantinya digunakan sebagai dasar dan acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019. PPAS Tahun Anggaran 2019 merupakan kerangka akhir untuk menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2019 sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019, menyebutkan bahwa penetapan KUA dan PPAS APBD dibahas dan disepakati bersama antara pihak Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kemudian dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan Bersama.

Sebagaimana dimaksud Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, PPAS memberikan informasi tentang skala prioritas untuk urusan SKPD yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai SKPD. Disamping itu, PPAS Tahun 2019 juga memberikan informasi tentang Prioritas Program berdasarkan indikasi prioritas

dan kegiatan pembangunan masing-masing SKPD. Selanjutnya, PPAS Tahun 2019 akan digunakan sebagai acuan bagi masing-masing SKPD dalam penyusunan RKA Tahun 2019.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan PPAS Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 34, maksud dan tujuan penyusunan PPAS Tahun 2019 adalah:

1. Sebagai pedoman dan acuan penyusunan RAPBD Tahun 2019.
2. Sebagai dasar pijakan bagi SKPD untuk menyusun RKA SKPD dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.
3. Memberikan informasi tentang prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai SKPD dan program yang dijadikan prioritas Tahun 2019.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS TAHUN 2019

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);

26. Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 38).

1.4 Proses dan Tahap Penyusunan PPAS APBD Tahun 2019

Proses dan Tahap penyusunan PPAS Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Tahap I Penyiapan Rancangan PPAS Kota Padang Tahun 2019 bersamaan dengan Persiapan Rancangan KUA-APBD Tahun 2019.
- Tahap II Penulisan Draft Rancangan PPAS Tahun 2019 dilakukan setelah selesai KUA Tahun 2019 dan disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) SKPD setelah dilakukan sinkronisasi dengan prioritas program dan kegiatan RKPD Tahun 2019.
- Tahap III Pembahasan Draft Rancangan PPAS 2019 secara komprehensif antara Tim TAPD dengan Forum SKPD untuk penyesuaian skala prioritas program dan kegiatan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
- Tahap IV Penulisan Draft Rancangan PPAS Tahun 2019 sebagai tindak lanjut KUA Tahun 2019 oleh Tim Penulis.
- Tahap V Penyampaian dan pembahasan Rancangan PPAS Tahun 2019 dilakukan oleh Kepala Daerah untuk dibahas selanjutnya untuk disepakati bersama dengan pihak DPRD.

Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 KUA Tahun 2019 mempunyai ruang lingkup kebijakan APBD sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019, implimentasinya terlihat dalam PPAS.

1.5 Sistematika Penyusunan PPAS APBD Tahun 2019

Sistematika Penyusunan PPAS Tahun 2019 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan PPAS, proses dan tahap penyusunan PPAS dan sistematika penyusunan PPAS Tahun 2019.

BAB II PENDAPATAN DAERAH

Berisikan target pendapatan daerah yang meliputi seluruh penerimaan berdasarkan kebijakan daerah dalam KUA Tahun 2019.

BAB III BELANJA DAERAH

Berisikan urutan prioritas penggunaan pendapatan yang dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Sebelum diuraikan berdasarkan urutan prioritas terlebih dulu diberikan gambaran pengelompokan klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja tidak langsung dan belanja daerah langsung.

BABIV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Bagian ini menguraikan Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang dituangkan secara deskriptif dalam bentuk tabulasi anggaran. Pada bagian pertama PAS diuraikan menurut belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, bagian kedua diuraikan Plafon Anggaran Sementara (PAS) menurut urusan dan SKPD serta program dan kegiatan.

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Bagian ini menguraikan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

BAB VI PENUTUP

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa kebijakan perencanaan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai arti pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah ini ditetapkan berdasarkan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan kepada peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Dana Perimbangan dan,
3. Pendapatan Lain-Lain yang Sah.

Dalam upaya penetapan target pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan memperhatikan: perkiraan pertumbuhan ekonomi, rasionalitas nilai kekayaan daerah, manfaat ekonomi, sosial dan lainnya dengan tidak memberatkan masyarakat maupun badan usaha, yang diatur melalui Undang-Undang dan Peraturan Daerah seperti mengenai pajak dan retribusi serta realisasi tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, maka upaya yang dilakukan dalam peningkatan PAD adalah melakukan penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya disamping peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah. Dalam Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan secara rasional dengan

memperhatikan fungsi penyertaan modal dan pendayagunaan kekayaan/aset daerah yang sudah dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

Dalam rangka menetapkan kebijakan perencanaan Dana Perimbangan Tahun 2019 berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Tahun 2019 dengan memperhatikan realisasi DBH 3 tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, 2016 dan 2015. Sementara perhitungan DAU dan DAK Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN tahun 2019, dalam hal Peraturan Presiden tersebut belum ditetapkan, maka penganggaran DAU mengacu didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018. Sedangkan untuk penganggaran DAK mengacu kepada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Pengalokasian anggaran DAK setelah adanya Perpres mengenai Rincian APBN atau publikasi resmi dari Kementerian Keuangan. Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Daerah tetap mempertimbangkan rencana pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang nantinya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan terhadap Pendapatan Daerah Lain-Lain Yang Sah, disesuaikan dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Sedangkan pendapatan hibah tahun 2019 berasal dari hibah BOS yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

2.2 Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah

Berdasarkan kebijakan diatas, target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 2,46 Trilyun naik 5,82% jika dibandingkan dengan Tahun 2018. Pendapatan Daerah melalui sumber-sumber penerimaan yang berasal dari:

1. PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Rp 824.377.000.000,00	(+37,11%)
2. Dana Perimbangan	Rp1.383.584.376.000,00	(-5,96%)
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 255.328.533.000,00	(+0,04%)

Dalam DAU Tahun 2019 diperkirakan adanya pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang nantinya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan celah fiskal (kemampuan dan kapasitas fiskal daerah). Pertimbangan ini cukup realistis disebabkan perlunya antisipasi kenaikan belanja pegawai dan guru termasuk belanja Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan jika besaran alokasi DAU belum ditetapkan maka tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019, bahwa bilamana perhitungan besaran DAU untuk masing-masing daerah belum ditetapkan maka angka yang dipedomani mengacu kepada besaran DAU tahun sebelumnya.

Besaran alokasi Dana Perimbangan pada Tahun 2019 diperkirakan berkurang dari tahun 2018. Secara terinci komposisi Pendapatan Daerah pada PPAS APBD Kota Padang Tahun 2019 dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rencana Pendapatan Daerah pada
APBD Kota Padang Tahun 2019 (dalam Rupiah)

KD REK	URAIAN	APBD 2018	PPAS 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	PENDAPATAN	2.327.874.779.500,00	2.463.289.909.000,00	135.415.129.500,00	5,82
1:01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	601.248.595.500,00	824.377.000.000,00	223.128.404.500,00	37,11
1:01:01	HASIL PAJAK DAERAH	400.911.615.195,00	565.430.000.000,00	164.518.384.805,00	41,04
1:01:02	HASIL RETRIBUSI DAERAH	69.902.387.186,00	95.725.480.357,00	25.823.093.171,00	36,94
1:01:03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	18.718.500.000,00	20.000.000.000,00	1.281.500.000,00	6,85
1:01:04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	111.716.093.119,00	143.221.519.643,00	31.505.426.524,00	28,20
1:02	DANA PERIMBANGAN	1.471.197.651.000,00	1.383.584.376.000,00	(87.613.275.000,00)	(5,96)
1:02:01	BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	86.051.392.000,00	86.051.392.000,00	0,00	0,00
1:02:02	DANA ALOKASI UMUM	1.100.370.559.000,00	1.100.370.559.000,00	0,00	0,00
1:02:03	DANA ALOKASI KHUSUS	284.775.700.000,00	197.162.425.000,00	(87.613.275.000,00)	(30,77)
	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	67.977.946.000,00	0,00	(67.977.946.000,00)	(100,00)
	DANA ALOKASI KHUSUS NON	216.797.754.000,00	197.162.425.000,00	(19.635.329.000,00)	(9,06)

	FISIK				
1:03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	255.428.533.000,00	255.328.533.000,00	(100.000.000,00)	(0,04)
1:03:01	PENDAPATAN HIBAH	125.446.200.000,00	125.346.200.000,00	(100.000.000,00)	(0,08)
1:03:03	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	101.732.333.000,00	101.732.333.000,00	0,00	0,00
1:02:06	DANA INSENTIF DAERAH	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.327.874.779.500,00	2.463.289.909.000,00	135.415.129.500,00	5,82

Rincian Pendapatan Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019
Berdasarkan SKPD Penghasil Kota Padang

No	Nama OPD	PAD 2018	Usulan PAD 2019 dari SKPD
A.	PAJAK	<u>400.911.615.195,00</u>	<u>565.430.000.000,00</u>
1.	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
a.	PAJAK DAERAH	400.911.615.195	565.430.000.000
1.	Pajak Hotel	34.200.000.000	40.000.000.000
2.	Pajak Restoran	36.000.000.000	48.000.000.000
3.	Pajak Hiburan	8.400.000.000	12.000.000.000
4.	Pajak Reklame	10.200.000.000	15.000.000.000
5.	Pajak Penerangan Jalan	114.960.955.840	120.000.000.000
6.	Pajak Parkir	2.400.000.000	3.000.000.000
7.	Pajak Air Tanah	900.000.000	3.000.000.000
8.	Pajak Sarang Burung Walet	6.000.000	10.000.000
9.	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	48.000.000.000	54.000.000.000
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	67.844.659.355	120.420.000.000
11.	Pajak Bumi dan Bangunan	78.000.000.000	150.000.000.000
B.	RETRIBUSI	<u>69.902.387.186,00</u>	<u>90.220.440.020,00</u>
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
a.	RETRIBUSI JASA USAHA	1.112.000.000	1.500.000.000
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.112.000.000	1.500.000.000
2	DPUPR		
a.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU:	19.200.000.000,00	<u>26.880.000.000</u>
	Reribusi Izin Mendirikan Bangunan:		
1.	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	17.553.900.000	26.880.000.000

No	Nama OPD	PAD 2018	Usulan PAD 2019 dari SKPD
	- Perumahan	17.495.073.540	26.880.000.000
	- Perdagangan dan Jasa	-	-
	- Perbelanjaan Pendidikan	-	-
	- Perkantoran	-	-
	- Penataan Ruang	-	-
	- Pengkaplingan	-	-
	- Piutang	58.826.460	-
2.	Kecamatan	1.646.100.000	-
3	DINAS PERHUBUNGAN		
	RETRIBUSI DAERAH	9.700.365.124	14.331.940.877
a.	RETRIBUSI JASA UMUM :	8.015.514.132	
1.	Retribusi Pel.Parkir di Tepi Jalam Umum	5.113.130.132	
	- Parkir Truck	541.000.000	
	- Parkir Harian	3.044.282.500	
	- Parkir Bulanan	660.000.000	
	- Retr. Tepi Jalan Umum (Tunggakan)	867.847.632	
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.902.384.000	
3	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
b.	RETRIBUSI JASA USAHA :	924.850.992	
1	Retribusi Terminal	282.640.000	
	- Retribusi Terminal (Tunggakan)	125.358.860	
2.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	127.735.000	
3.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	389.117.132	
C.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	760.000.000	
1.	Retribusi Izin Trayek (Tunggakan)	760.000.000	
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	PENERIMAAN	<u>12.430.305.600</u>	<u>17.402.427.840</u>
	RETRIBUSI JASA UMUM :	12.205.305.600	17.152.427.840
1.	Retribusi Pel. Persampahan/Kebersihan	10.429.497.600	14.964.802.840
2.	Retribusi Pel. Pemakaman & Pengabuan	1.654.608.000	2.015.625.000
3.	Retribusi Penyediaan & Penyedotan WC	121.200.000	172.000.000
	RETRIBUSI JASA USAHA :	225.000.000	250.000.000
1.	Retribusi Jasa Usaha		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	225.000.000	250.000.000
5	BADAN PEMADAM KEBAKARAN		

No	Nama OPD	PAD 2018	Usulan PAD 2019 dari SKPD
	RETRIBUSI DAERAH	990.000.000	1.485.000.000
a.	RETRIBUSI JASA UMUM	955.000.000	
1.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	955.000.000	
	APAR	420.000.000	
	Hydrant	60.000.000	
	Spingler/Alarm	295.000.000	
	APAR Angkutan Darat dan Laut	180.000.000	
b.	RETRIBUSI JASA USAHA	35.000.000	
1.	Ret.Pemakaian Kekayaan Daerah	23.750.000	
2	Ret.Pemakaian KORSIK	11.250.000	
6	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	RETRIBUSI JASA USAHA :	<u>3.600.000.000</u>	<u>5.040.000.000</u>
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	153.304.000	174.640.000
b.	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	3.446.696.000	4.865.360.000
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU:	<u>120.000.000</u>	<u>168.000.000</u>
a.	Retribusi Izin Gangguan	-	-
b.	Retribusi Perpanjangan IMTA	120.000.000	168.000.000
8	DINAS PERTANIAN		
	RETRIBUSI JASA USAHA :	<u>840.000.000</u>	<u>1.360.150.000</u>
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :	762.816.000	1.143.111.000
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	245.025.000	407.250.000
2.	Pemakaian Kandang	81.475.000	133.750.000
3.	Pemakaian Tempat Pematangan	410.375.000	465.125.000
4.	Sewa Gedung Pertemuan/Sawu Meeting	25.941.000	36.836.000
5	Taman Hutan Raya Bung Hatta		100.150.000
	<i>Karcis Masuk</i>		42.800.000
	<i>Kamar VIP</i>		15.300.000
	<i>Kamar Biasa</i>		21.300.000
	<i>Ruang Pertemuan</i>		12.250.000
	<i>Bumi Perkemahan</i>		8.500.000
b.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	77.184.000	116.889.000
1.	Penjualan Bibit Tanaman	77.184.000	116.889.000
9	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		

No	Nama OPD	PAD 2018	Usulan PAD 2019 dari SKPD
	RETRIBUSI JASA USAHA :	2.400.000.000	3.600.000.000
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga :	2.400.000.000	
1.	Wisata Pantai Air manis	1.200.000.000	
2.	Wisata Pantai Pasir Jambak	-	
3.	Wisata Gunung Padang	600.000.000	
4.	Pemandian Lubuk Minturun/Air Dingin	50.000.000	
5.	Pemandian Lubuk Peraku	50.000.000	
7.	Pemakaian Wahana Permainan	-	
8.	Sewa LPC	365.000.000	
9	Pemakaian Fasilitas barang Milik Daerah		
10	Pemakaian Lokasi Acara Hiburan/Pameran/- Promosi	135.000.000	
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-
	RETRIBUSI DAERAH	3.019.200.000	4.216.800.000
	RETRIBUSI JASA USAHA	3.019.200.000	4.216.800.000
1.	Retribusi pemakaian kekayaan daerah :	92.700.000	92.700.000
	- Sewa Kendaraan Thermo King (pengangkut es)	86.400.000	86.400.000
	- Sewa Gedung Pertemuan BBI Bungus	2.100.000	2.100.000
	- Sewa Kamar Tidur BBI Bungus	4.200.000	4.200.000
2.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.926.500.000	4.124.100.000
	- Penjualan Benih Ikan dari BBI Bungus	238.635.000	238.637.500
	- Penjualan Es Batang dr Pabrik Es Muaro Anai	2.687.865.000	3.885.462.500
11	DINAS PERDAGANGAN		
	RETRIBUSI DAERAH	16.490.516.462,00	12.736.271.303,00
	RETRIBUSI JASA UMUM :	16.394.516.462,00	12.673.271.303,00
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	13.382.236.920,00	10.976.771.303,00
	- Retribusi Bulanan Pasar	6.322.190.520	1.500.000.000
	- Retribusi Bulanan Pasar lain-lain		1.629.094.173
	- Piutang		600.000.000
	- Denda Retribusi Bulanan Pasar		47.677.130
	- Retribusi Harian Pasar	7.060.046.400	4.000.000.000
	- Retribusi Harian Pasar lain-lain		3.200.000.000
2.	Retribusi Penyediaan dan Peny. Kaku		1.080.000.000
	Retribusi Penyediaan dan Peny. Kaku	1.008.000.000	600.000.000
	Ret. Penyediaan dan Peny. Kaku lain2		480.000.000
3.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.004.279.542	342.500.000
4	Pemakaian kekayaan daerah		274.000.000

No	Nama OPD	PAD 2018	Usulan PAD 2019 dari SKPD
b.	Retribusi Perizinan Tertentu	96.000.000	63.000.000
1	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	96.000.000	63.000.000
	- Golongan A	42.000.000	15.000.000
	- Golongan B & C	54.000.000	20.000.000
	- Ret.Izin tempat penj. Minol Lain2	-	28.000.000
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / DISHUB		
	RETRIBUSI JASA USAHA	-	1.600.000.000
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :	-	1.600.000.000
	- Retribusi Mobil Siaran Keliling	-	-
	- Retribusi menara telekomunikasi		1.600.000.000
C.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	<u>111.716.093.119.00</u>	<u>148.726.559.980.00</u>
		-	-
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	LAIN-LAIN PAD YG SAH	4.404.952.325	13.905.239.045
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	695.000.000	750.000.000
	Pendapatan Denda Pajak Restoran	208.562.725	300.000.000
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	140.000.000	200.000.000
	Pendapatan Denda Pajak Reklame	50.000.000	263.000.000
	Pendapatan Denda Pajak PPJ	-	-
	Pendapatan Denda Pajak Parkir	70.000.000	70.000.000
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	70.000.000	70.000.000
	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	-
	Pendapatan Denda Pajak MBLB	-	1.184.042
	Pendapatan Denda Administrasi PPAT	-	15.000.000
	Pendapatan Denda Pajak PBB P2	2.527.389.600	10.235.055.003
	Pendapatan Denda Pemakaian Kekayaan Daerah	-	1.000.000
	Denda Retribusi Sewa Tanah		
	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pemb. Reklame	644.000.000	2.000.000.000
2.	DINAS KESEHATAN KOTA		
	LAIN-LAIN PAD YG SAH	<u>48.800.000.000</u>	<u>48.800.000.000</u>
a.	Pendapatan dari Pelayanan Kesehatan :	12.200.000.000	12.200.000.000
1.	Surat Keterangan Kesehatan Umum	366.000.000	366.000.000
2.	Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	45.750.000	45.750.000
3.	Surat Keterangan Kesehatan Buta Warna	50.020.000	50.020.000
4.	Surat Keterangan Kesehatan Haji	61.000.000	61.000.000

No	Nama OPD	PAD 2018	Usulan PAD 2019 dari SKPD
5.	SKK Catin	25.620.000	25.620.000
6.	SKK Visum Hidup	244.000	244.000
7.	Jasa Non Kapitalisasi JKN	1.220.000.000	1.220.000.000
8.	Pendapatan Jasa Giro	305.000.000	305.000.000
9.	Jasa Pelanan Pasien Umum	4.026.366.000	4.026.366.000
10	Pendapatan hasil kerjasama		
11	Sisa lebih tahun sebelumnya	6.100.000.000	6.100.000.000
b.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	36.600.000.000	36.600.000.000
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	36.600.000.000	36.600.000.000
3.	RSUD Dr. RASIDIN		
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH :	<u>34.098.769.884</u>	<u>36.532.143.449</u>
1.	Penerimaan Pendidikan Kesehatan	386.354.596	386.354.596
2.	Pendapatan BPJS RSUD	25.689.200.288	27.591.998.853
3.	Pendapatan dari Pelayanan Kesehatan :	8.023.215.000	8.553.790.000
	- Administrasi /karcis	600.000.000	600.000.000
	- Tindakan Operasi	1.340.390.000	1.340.390.000
	- Rawat Jalan	188.000.000	188.000.000
	- Rawat Inap Umum	1.085.000.000	1.085.000.000
	- Rawat Inap VIP	-	-
	- Rawat Inap VVIP	-	-
	- Laboratorium	421.925.000	600.000.000
	- Radiologi	60.000.000	100.000.000
	- Ambulance	22.500.000	22.500.000
	- Jasa Konsultasi Gizi	10.000.000	10.000.000
	- Jasa Konsultasi Medik	207.500.000	500.000.000
	- IGD	130.000.000	150.000.000
	- Oksigen (O2)	94.500.000	94.500.000
	- Surat Keterangan	585.000.000	585.000.000
	- Tindakan Pembiusan	-	-
	- Medical Cek Up	3.150.000.000	3.150.000.000
	- Sewa Alat Kesehatan	-	-
	- Fisioterapi dan Terapi Wicara	28.000.000	28.000.000
	- Biaya Jasa Raharja	50.000.000	50.000.000
	- Bunga Giro Jan s/d Des. 2018	50.400.000	50.400.000
4	DPRKPP		
	LAIN-LAIN PAD YANG SYAH :	<u>838.200.000</u>	<u>1.257.300.000</u>
	- Pendapatan Sewa Rusunawa	838.200.000	1.257.300.000

No	Nama OPD	PAD 2018	Usulan PAD 2019 dari SKPD
5	DINAS PERHUBUNGAN,		
	LAIN-LAIN PAD YANG SYAH :	10.884.416.000	15.515.991.753
1	Pendapatan Denda Retribusi Kendaraan Bermotor	76.638.000	
2	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek		
3	Pelayanan Transportasi (BRT)	10.452.778.000	
4	Pelayanan Parkir Meter	355.000.000	
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	LAIN-LAIN PAD YANG SYAH :	960.000.000	1.344.000.000
1.	Perubahan Kartu Keluarga (KK)	18.000.000	1.344.000.000
2.	Kelahiran	918.600.000	-
3.	Perkawinan	9.000.000	-
4.	Kematian	1.800.000	-
5.	Perceraian	600.000	-
6.	Pengangkatan Anak (Adopsi)	1.200.000	-
7.	Pengesahan Anak	9.000.000	-
8.	Perubahan Nama	1.800.000	-
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET		
	LAIN-LAIN PAD YANG SYAH :	10.119.471.310	23.256.956.965
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yg dipisahkan	-	200.000.000
	- Perlengkapan Kantor		100.000.000
	- Gedung Kantor		100.000.000
2	Penerimaan Jasa Giro	5.550.588.000	12.500.000.000
3	Pendapatan Bunga Deposito	2.800.000.000	7.500.000.000
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	600.000.000	956.956.965
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan	60.000.000	400.000.000
6	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	240.000.000	450.000.000
7	Pendapatan dari Pengembalian Setoran	820.883.310	1.200.000.000
8	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		-
9	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	48.000.000	50.000.000
8	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH :	100.800.000	151.200.000
	- Sewa Alat Cold Storage	72.000.000	72.000.000
	(Alat Pendingin dan Penyimpan Ikan)		
	- Sewa Tempat Pengolahan Ikan Basah menjadi Ikan kering.	28.800.000	28.800.000
	- Penyewaan os Ikan Pantai Purus	-	50.400.000

No	Nama OPD	PAD 2018	Usulan PAD 2019 dari SKPD
9	DINAS PASAR		
	LAIN-LAIN PAD YANG SYAH :		
1	Hasil Penjualan petak tok		
2	Pendapatan Denda Retribusi		
3	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		
10	DINAS PERDAGANGAN		
	LAIN-LAIN PAD YANG SYAH :	1.509.483.600	7.963.728.768
	Pendapatan Royalti :	1.509.483.600	7.963.728.768
	- Pendapatan Royalti TLA	259.200.000	212.000.000
	- Pendapatan Royalti SPR	1.250.283.600	1.022.608.500
	- Piutang Royalti		5.729.120.268
	- Pendapatan Royalti Fase		1.000.000.000
D.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN		
	DAERAH YANG DIPISAHKAN :	<u>18.718.500.000,00</u>	<u>20.000.000.000,00</u>
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	-	-
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN :	18.718.500.000	20.000.000.000
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	18.718.500.000	20.000.000.000
	- Bank Nagari		15.000.000.000
	- PDAM		5.000.000.000
	JUMLAH	601.248.595.500,00	824.377.000.000
	TARGET	PAD 2018	Rencana Target 2019
	PAJAK	400.911.615.195,00	565.430.000.000,00
	RETRIBUSI	69.902.387.186,00	95.725.480.357,00
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	111.716.093.119,00	143.221.519.643,00
	HASIL PENG. KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	18.718.500.000,00	20.000.000.000,00
	JUMLAH	601.248.595.500,00	824.377.000.000,00

Tabel 2.3
Asumsi Dana Perimbangan Tahun 2019

KODE	URAIAN	PPAS 2019
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.383.584.376.000
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	86.051.392.000
1.2.1.01.	BAGI HASIL PAJAK	84.503.802.000
1.2.1.01.01.	BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	9.153.953.000
1.2.1.01.03.	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21	75.349.849.000
1.2.1.02.	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM	1.547.590.000
1.2.1.02.15.	BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA	315.310.000
1.2.1.02.16.	BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN	249.413.000
1.2.1.02.17.	BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN	943.027.000
1.2.1.02.18.	BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI	39.840.000

Tabel 2.4
Asumsi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019

KODE	URAIAN	PPAS 2019
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	255.328.533.000
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	125.346.200.000
1.3.1.03.	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA DALAM NEGERI	15.000.000.000
1.3.1.03.02.	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA DALAM NEGERI.	15.000.000.000
1.3.1.06.01.	HIBAH DANA BOS SD	72.639.200.000
1.3.1.06.02.	HIBAH DANA BOS SMP	37.707.000.000
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	101.732.333.000
1.3.3.01.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	101.732.333.000
1.3.3.01.01.	BAGI HASIL DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	19.843.700.000
1.3.3.01.03.	BAGI HASIL DARI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	33.644.288.000
1.3.3.01.05.	BAGI HASIL DARI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	29.068.706.000
1.3.3.01.07.	BAGI HASIL DARI PAJAK AIR PERMUKAAN	216.066.000
1.3.3.01.08.	BAGI HASIL DARI PAJAK ROKOK	18.959.573.000
1.3.6.	DANA INSENTIF DAERAH	28.250.000.000
1.3.6.01.	DANA INSENTIF DAERAH.	28.250.000.000
1.3.6.01.01.	DANA INSENTIF DAERAH..	28.250.000.000

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH DAN PENGELUARAN

3.1 Rencana Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kebijakan belanja daerah meliputi semua pengeluaran daerah yang merupakan urusan Pemerintah Daerah selama tahun anggaran yang berkenaan, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019, dinyatakan bahwa belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Jumlah belanja daerah perlu diselaraskan dengan sumber-sumber penerimaan, seperti penerimaan DBH yang berasal dari pajak dan non pajak, DAU dan DAK.

Pengalokasian belanja pada setiap SKPD dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulan dengan menetapkan target capaian kinerja untuk setiap belanja serta dengan memperhatikan kecukupan anggaran, sehingga dalam implementasinya diharapkan program dan kegiatan yang dimaksud dapat ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerjanya untuk menunjang kebijakan yang ada serta berkorelasi dengan keluaran yang diharapkan. Kebijakan Umum Belanja Daerah pada APBD Tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah diarahkan kepada peningkatan pelayanan publik melalui program utama peningkatan pembangunan Pendidikan dan Kesehatan. Pada Tahun 2019, perhatian difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

2. Belanja Daerah diprioritaskan untuk Urusan Wajib ataupun Urusan Pilihan yang dijabarkan dalam Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
3. Menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019.
4. Menjaga konsistensi dalam mendukung 5 (lima) bidang Pembangunan Nasional dan 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kebijakan Anggaran Belanja tersebut akan disesuaikan dengan program prioritas pembangunan Kota Padang Tahun 2019. Sesuai KUA dan Prioritas Pembangunan, dalam sistem penganggaran belanja daerah akan dialokasikan dalam 2 kelompok belanja daerah yaitu :
6. Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tetapi menunjang secara penuh pelaksanaan tupoksi dan fungsi pemerintah.
7. Belanja Langsung adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan. Namun dalam penyusunan APBD Tahun 2019 ini adalah selalu berupaya melakukan penyesuaian terhadap Penerimaan Daerah baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Selain itu pengalokasian belanja lebih ditekankan kepada upaya penuntasan pencapaian Visi dan Misi serta pelaksanaan program prioritas sebagaimana termuat dalam Revisi RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019, selain itu juga dalam rangka menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Belanja Tidak Langsung

Secara umum arah kebijakan belanja tidak langsung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan pada pengeluaran gaji ASN dan mengantisipasi kenaikan gaji pada tahun 2019.
2. Belanja bantuan sosial dan belanja hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa belanja hibah dan bantuan sosial tidak boleh terlalu besar dengan tetap mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan diubah dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hibah dan Bansos.

3. Belanja tak terduga diarahkan penggunaannya untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan baik bencana alam maupun bencana sosial.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari :

1. Belanja Pegawai ditampung dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS, dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta memperhitungkan pemberian gaji ke 13 dan gaji ke 14 pada rekening khusus THR dan rekening khusus Gaji Ketiga Belas.
2. Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2019.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *accress* yang besarnya 2,5 % dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
5. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNS dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6. Pemberian Tambahan penghasilan untuk PNS di Lingkungan Pemko Padang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD.
7. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Belanja Bunga, pembayaran bunga atas pinjaman daerah melalui PT. SMI untuk Pengembangan RSUD.

9. Belanja Subsidi, alokasi anggaran untuk perusahaan/lembaga Subsidi tertentu yang menghasilkan produk kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
10. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Penganggarannya Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah tentang hibah dan bansos. Alokasi anggaran hibah digunakan untuk pemberian hibah dari Pemerintah kepada kelompok masyarakat/perorangan yang berhak mendapatkannya, sedangkan alokasi anggaran Bantuan Sosial diarahkan penggunaannya untuk pemberian bantuan kepada masyarakat berupa santunan kematian (bantuan penyelenggaraan jenazah) bagi warga kurang mampu, bantuan untuk rumah rusak ringan akibat bencana alam, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana alam dengan mempedomani peraturan kepala daerah.
11. Belanja Bantuan Keuangan, dialokasikan anggarannya diarahkan untuk menunjang kegiatan dan Partai Politik.
12. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2019 bagi PAUD yang diselenggarakan Kabupaten/Kota (negeri) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk belanja hibah.
13. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani Pasal 10 ayat (1) huruf f dan penjelasannya, Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
14. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan

keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

15. Kegiatan-kegiatan yang akan didanai oleh Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Atas dasar keputusan Kepala Daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
 - c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan
 - d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD.
16. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak
17. Besaran TPP mempedomani SK Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2018.
18. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan berdasarkan harga survei/pasar.

Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan. Namun dalam penyusunan APBD Tahun 2019 ini adalah selalu berupaya melakukan penyesuaian terhadap Penerimaan Daerah baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Selain itu pengalokasian belanja lebih ditekankan kepada upaya penuntasan pencapaian Visi dan Misi serta pelaksanaan program prioritas sebagaimana termuat dalam Revisi RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019, selain itu juga dalam rangka menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Kebijakan belanja langsung adalah :

1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong investasi daerah. Penyusunan Anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional, serta memperhatikan beban kerja dan faktor-faktor kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD. Hal ini ditujukan untuk menghindari pemborosan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
2. Terhadap program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Caranya adalah dengan memberikan batasan terhadap anggaran Belanja Pegawai dan Barang serta Jasa yang terkait dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan.
3. Terhadap belanja pegawai penganggaran honorarium PNS dan Non PNS memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, ditetapkan berdasarkan Standar Anggaran Biaya sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan bagi Non PNS

(pegawai tidak tetap) tetap mengacu kepada Standar Anggaran Biaya tersebut diatas dengan memperhatikan peran dan kontribusi serta terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD.

4. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan Permendagri Nomor 38 tahun 2018, dimana setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain, pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.
 - Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah dengan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
 - Sesuai dengan Lampiran Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019 angka Romawi II, Nomor 2 huruf b point 3) huruf h), pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangunan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
 - Penganggaran honorarium Pokja ULP berada pada masing-masing SKPD yang menganggarkan belanja modal konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya serta belanja jasa konsultasi.
 - Kebijakan penganggaran upah dan tenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan maupun dengan pihak ketiga, termasuk Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
 - Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

- Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata pelayanan SKPD dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2018.
 - Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah.
 - Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
 - Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan BPJS diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berupa pelayanan medical Check Up sebanyak 1 (satu) kali setahun termasuk keluarga(suami/istri dan dua anak) sedangkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan pelayanan medical chek up satu kali setahun tidak termasuk keluarga dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait langsung dengan PP No. 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
5. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 yang terkait dengan pengadaan pembangunan aset yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, sampai aset tersebut siap digunakan, juga mengenai Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sistem *multiyear*. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dianggarkan pada masing-masing SKPD pengguna dengan difasilitasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang.
6. Penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD berkenaan.

7. Pengusulan Program dan kegiatan harus dilampiri dengan KAK, RUP, RKBMD serta mengacu kepada SSH dan ASB.
8. Penyusunan Rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga, dan dalam merencanakan pengadaan barang serta pemeliharaan barang, kepada SKPD agar membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
9. Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang akan ditender sudah diketahui dari awal perencanaan.
10. Bagi SKPD agar memperhitungkan biaya kenaikan TDL yang berimplikasi terhadap pembayaran Rekening Listrik dan Biaya PDAM dan bagi SKPD yang mempunyai tunggakan Listrik, telepon dan PDAM segera menyelesaikan tunggakannya tersebut dalam Tahun Anggaran 2019.
11. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
12. Penganggaran untuk belanja alat tulis kantor, cetak-penggunaan, dan perjalanan dinas agar diakomodir dalam kegiatan rutin pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kecuali bila belanja tersebut berkorelasi langsung dengan output kegiatan.
13. SKPD wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP-SKPD) sebagai syarat pelaksanaan pelelangan. Apabila barang/jasa yang akan diadakan tersebut termuat dalam sistem katalog elektronik (e-katalog), maka SKPD wajib melakukan e-Purchasing dengan mempertimbangkan kenaikan harga pada tahun 2019.
14. Bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan yang bersifat kontraktual (diborongkan) dan dimungkinkan pembayarannya belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, agar melampirkan daftar kegiatan dimaksud disertai dengan biaya yang belum dibayarkan (baik kewajiban kepada pihak ketiga/retensi maupun kegiatan lanjutan).
15. Penganggaran terhadap Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan harus memiliki output yang berkorelasi langsung terhadap kegiatan dengan melibatkan personil

lintas sektoral yang didukung dengan job description yang jelas dan terukur, serta bukti fisik sebagai bentuk pelaporan.

16. Jumlah Honorarium kegiatan yang diterima PA/KPA dibatasi sesuai dengan Standar Biaya Tahun 2018.
17. Penggunaan tenaga ahli (supporting staff) hanya dapat dialokasikan apabila memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan yang memerlukan keahlian khusus.
 - b. Harus melalui proses recruitment dan/atau MOU/SPK antara Kuasa Pengguna Anggaran dan tenaga tersebut dengan batasan waktu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.
 - c. Memperlihatkan/melampirkan sertifikat keahlian dari lembaga yang capable untuk menunjukkan kompetensi yang bersangkutan.
 - d. Proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan selama masa kerja yang bersangkutan.
18. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Publik dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, penganggaran gaji pegawai honor dan kontrak berada pada Belanja Pegawai dengan rekening Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap dan mengalokasikan anggaran biaya pendukung kegiatan berupa belanja ATK sebesar Rp. 300.000 serta belanja Foto Copy sebesar Rp. 200.000,-
19. Tidak diperkenankan menganggarkan penambahan tenaga honorer dan sejenisnya (TKS dan TKK yang diangkat oleh PA/KPA) di SKPD sebelum diproses oleh BKPSDM untuk mendapatkan izin dari Walikota atau Sekretaris Daerah.
20. Standar honorarium pengelola kegiatan (sesuai dengan SAB 2018), untuk kegiatan yang anggarannya di bawah Rp.50.000.000,- tidak diberikan honorarium kecuali standard honorariumnya sudah diatur dalam SAB (misalnya; komite medik, SPIP, dll)
21. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mempunyai bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing KPA yang ditetapkan Kepala Daerah.
22. Kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap adalah :
 - Pengadaan untuk per unit peralatan dan mesin kantor, barang elektronik dan olah raga yang nilainya diatas atau sama dengan Rp.250.000,-

- Untuk gedung/bangunan/jalan/irigasi dan jaringan dengan nilai di atas atau sama dengan Rp.10.000.000,-
23. Bagi BLUD RSUD dr. Rasidin dan BLUD puskesmas memperhatikan antara lain sebagai berikut:
- a. penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - b. tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
24. Penganggaran Dana BOS SD dan SMP mempedomani RKAS yang disusun oleh masing-masing sekolah. Proses penyusunan RKAS mempedomani aturan yang berlaku.

Selanjutnya, arah pengalokasian Belanja Daerah dalam PPAS 2019 terdiri dari 2 (dua) kelompok utama belanja daerah, yaitu :

1. **Belanja Daerah Tidak Langsung;** yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Bunga Pinjaman, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Belanja Tak Terduga.
2. **Belanja Daerah Langsung;** adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanja langsung dikelompokkan atas 3 yaitu :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal

Dalam APBD Kota Padang Tahun 2019, jumlah plafon Belanja Daerah ditargetkan sebesar 2,462 Trilyun rupiah. Dari Plafon Anggaran Sementara tersebut sekitar 1,202 Trilyun rupiah atau 48,85% nantinya digunakan untuk bagi keperluan Belanja Tidak Langsung, sedangkan sisanya sekitar 1,259 Trilyun rupiah atau 51,15% digunakan bagi keperluan Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung tersebut dialokasikan kedalam :

- a. **Belanja Pegawai;** merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS dan ditetapkan sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, serta memperhitungkan pemberian gaji ke-13 DAN Tunjangan Hari Raya pada rekening khusus THR dan rekening khusus Gaji Ketiga Belas. Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2019. Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *accress* yang besarnya 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- b. **Belanja Bunga dan Subsidi;** untuk pembayaran bunga atas pinjaman daerah melalui pinjaman investasi Pemerintah untuk pengembangan RSUD sebesar Rp. 7,47 Miliar. Sedangkan untuk belanja subsidi, alokasi anggaran untuk perusahaan/lembaga subsidi tertentu yang menghasilkan produk kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- c. **Belanja Hibah;** pemberian alokasi anggaran digunakan untuk pemberian hibah dari Pemerintah kepada kelompok masyarakat/perorangan yang berhak mendapatkannya. Dalam tahun anggaran 2019 Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar 39,61 Milyar rupiah dari tahun sebelumnya sehingga jumlah Belanja Hibah tahun 2019 direncanakan sebesar 50,47 Milyar rupiah.
- d. **Belanja Bantuan Sosial;** alokasi anggaran diarahkan penggunaannya untuk pemberian bantuan kepada masyarakat berupa santunan kematian (bantuan penyelenggaraan jenazah) bagi warga kurang mampu, bantuan untuk rumah rusak ringan akibat bencana alam dengan mempedomani peraturan kepala daerah. Dalam tahun anggaran 2019 jumlah yang dialokasikan untuk Belanja Bantuan Sosial mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,91 Miliar rupiah, sehingga jumlah Belanja Bantuan Sosial tahun 2019 direncanakan sebesar 12,80 Milyar rupiah.
- e. **Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;** alokasi anggaran digunakan untuk menunjang kegiatan dan Partai Politik. Pada tahun anggaran 2019 jumlah yang disediakan untuk Belanja Bantuan Keuangan sama dengan Tahun 2018 sebesar 888,309 Juta rupiah.
- f. **Belanja Tak Terduga;** belanja ini khusus penggunaannya untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pada tahun anggaran 2019 disediakan Belanja Tak Terduga sebesar 2,621 Milyar rupiah, naik sebesar Rp. 1,62 Milyar jika dibandingkan dengan jumlah yang dialokasikan untuk tahun 2018.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung (BTL)
Pada PPAS Tahun 2019

KD REK	URAIAN	APBD 2018	PPAS 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
2:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.199.370.272.642,00	1.202.649.477.818,00	3.279.205.176,00	0,27
2:01:01	BELANJA PEGAWAI	1.101.900.243.518,00	1.128.399.643.242,00	26.499.399.724,00	2,40
2:01:02	BELANJA BUNGA	5.130.000.000,00	7.470.135.052,00	2.340.135.052,00	45,62
2:01:04	BELANJA HIBAH	83.567.785.400,00	50.469.216.800,00	(33.098.568.600,00)	(39,61)
2:01:05	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6.883.934.620,00	12.800.339.000,00	5.916.404.380,00	85,95
2:01:07	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	888.309.104,00	888.309.104,00	0,00	0,00
2:01:08	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	2.621.834.620,00	1.621.834.620,00	162,18

Tabel 3.2
Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) Berdasarkan SKPD
Pada PPAS Tahun 2019

KODE	DNAS/INSTANSI	APBD 2018	PPAS 2019	TAMBAH/KURANG
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	596.457.075.026,83	610.813.111.170,29	14.356.036.143
1.02.01.	DINAS KESEHATAN	66.155.437.113,00	75.488.464.117,40	9.333.027.004
1.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	17.876.786.008,25	17.868.207.835,00	(8.578.173)
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.758.272.993,00	8.844.923.922,00	86.650.929
1.04.01.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	4.229.793.802,00	4.088.947.869,00	(140.845.933)
1.05.01.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	4.087.476.806,00	4.083.777.419,80	(3.699.386)
1.05.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.688.451.370,00	6.273.337.597,00	584.886.227
1.06.01.	DINAS SOSIAL	2.889.334.523,00	3.223.632.696,00	334.298.173
2.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	3.692.192.368,00	3.912.780.452,80	220.588.085
2.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB	4.135.981.798,00	4.204.558.219,00	68.576.421
2.03.01.	DINAS PANGAN	1.666.836.390,00	1.699.807.115,40	32.970.725
2.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.371.419.213,40	17.395.010.853,20	1.023.591.640
2.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.610.020.072,00	3.931.688.228,60	321.668.157
2.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	9.233.389.735,00	9.389.740.698,20	156.350.963

KODE	DNAS/INSTANSI	APBD 2018	PPAS 2019	TAMBAH/KURANG
2.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.626.938.191,00	2.381.101.236,00	(245.836.955)
2.11.01.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.004.662.783,00	3.092.896.051,04	88.233.268
2.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.697.492.061,00	3.731.470.952,80	33.978.892
2.13.01.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.380.495.212,68	2.491.725.483,90	111.230.271
2.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.312.981.540,00	2.617.617.673,00	304.636.133
3.01.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.790.817.499,20	3.072.376.920,80	(718.440.578)
3.02.01.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2.873.744.884,00	2.982.121.360,00	108.376.476
3.03.01.	DINAS PERTANIAN	8.909.134.321,81	9.445.957.811,40	536.823.490
3.06.01.	DINAS PERDAGANGAN	7.104.603.731,00	7.277.111.649,60	172.507.919
4.01.01.	INSPEKTORAT	4.457.399.636,00	5.021.442.263,00	564.042.627
4.02.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.297.431.184,53	3.768.967.697,60	471.536.513
4.03.02.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	27.156.744.008,01	27.791.760.042,42	635.016.034
4.03.03.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.569.049.205,60	6.994.781.208,00	425.732.002
4.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	5.559.839.443,00	5.512.980.593,40	(46.858.850)
5.01.01.	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	1.065.431.040,76	1.082.993.485,40	17.562.445
5.01.02.	SEKRETARIAT DAERAH	11.116.588.335,12	13.083.191.459,80	1.966.603.125
5.02.01.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	23.324.972.575,00	23.278.558.925,00	(46.413.650)
5.02.02.	SEKRETARIAT DPRD	4.485.309.251,00	4.134.725.973,00	(350.583.278)
6.01.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.773.231.947,95	1.703.988.414,00	(69.243.534)
6.01.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.608.280.573,00	2.731.649.607,00	123.369.034
7.01.01.	KECAMATAN PADANG BARAT	6.501.415.815,00	5.084.871.409,80	(1.416.544.405)
7.01.02.	KECAMATAN PADANG TIMUR	5.554.934.004,30	5.724.548.004,00	169.614.000
7.01.03.	KECAMATAN PADANG UTARA	4.659.131.239,40	4.711.794.110,80	52.662.871
7.01.04.	KECAMATAN PADANG SELATAN	6.564.899.079,50	6.039.299.122,70	(525.599.957)
7.01.05.	KECAMATAN NANGGALO	4.741.289.789,10	4.964.991.066,00	223.701.277
7.01.06.	KECAMATAN KURANJI	5.804.970.420,00	6.164.532.841,00	359.562.421
7.01.07.	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	7.772.175.293,80	7.784.788.058,40	12.612.765

KODE	DNAS/INSTANSI	APBD 2018	PPAS 2019	TAMBAH/KURANG
7.01.08.	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	4.239.816.607,80	4.208.471.112,20	(31.345.496)
7.01.09.	KECAMATAN PAUH	5.087.819.822,15	4.899.406.927,40	(188.412.895)
7.01.10.	KECAMATAN KOTO TANGAH	7.956.921.889,00	7.186.128.153,40	(770.793.736)
7.01.11.	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	3.192.262.460,00	2.965.623.156,80	(226.639.303)

Tabel 3.3
Rekapitulasi Belanja Pegawai (Tambahannya Penghasilan PNS) berdasarkan SKPD pada PPAS Tahun 2019

KODE	DINAS/INSTANSI	APBD 2018	APBD 2019	TAMBAH/KURANG
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	19.516.200.000,00	19.664.400.000,00	148.200.000
1.02.01.	DINAS KESEHATAN	21.867.720.000,00	21.627.120.000,00	(240.600.000)
1.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7.186.680.000,00	7.618.080.000,00	431.400.000
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.304.146.500,00	4.563.014.981,40	258.868.481
1.04.01.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.768.320.000,00	1.684.320.000,00	(84.000.000)
1.05.01.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	2.166.280.000,00	2.094.480.000,00	(71.800.000)
1.05.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.787.120.000,00	2.811.720.000,00	24.600.000
1.06.01.	DINAS SOSIAL	1.381.320.000,00	1.433.160.000,00	51.840.000
2.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.514.400.000,00	1.552.320.000,00	37.920.000
2.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB	1.727.040.000,00	1.608.240.000,00	(118.800.000)
2.03.01.	DINAS PANGAN	778.080.000,00	793.080.000,00	15.000.000
2.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.620.763.810,00	8.402.289.864,00	(218.473.946)
2.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.602.120.000,00	1.602.720.000,00	600.000
2.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	4.276.520.000,00	4.152.920.000,00	(123.600.000)
2.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.095.750.000,00	1.107.200.000,00	11.450.000
2.11.01.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.293.120.000,00	1.303.923.000,00	10.803.000
2.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.683.840.000,00	1.595.964.000,00	(87.876.000)
2.13.01.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.352.425.000,00	1.231.225.000,00	(121.200.000)
2.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.058.400.000,00	1.122.660.000,00	64.260.000
3.01.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.608.070.000,00	1.550.910.000,00	(57.160.000)
3.02.01.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.494.040.000,00	1.528.942.000,00	34.902.000

KODE	DINAS/INSTANSI	APBD 2018	APBD 2019	TAMBAH/KURANG
3.03.01.	DINAS PERTANIAN	3.649.260.000,00	3.337.860.000,00	(311.400.000)
3.06.01.	DINAS PERDAGANGAN	3.463.809.176,00	3.410.375.823,44	(53.433.353)
4.01.01.	INSPEKTORAT	1.952.040.000,00	2.088.960.000,00	136.920.000
4.02.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.596.240.000,00	1.711.440.000,00	115.200.000
4.03.02.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.848.320.000,00	2.941.818.000,00	93.498.000
4.03.03.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	27.457.847.969,81	27.241.885.109,81	(215.962.860)
5.01.02.	SEKRETARIAT DAERAH	5.480.400.000,00	5.359.150.000,00	(121.250.000)
5.02.02.	SEKRETARIAT DPRD	1.632.720.000,00	1.475.520.000,00	(157.200.000)
6.01.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	619.560.000,00	593.160.000,00	(26.400.000)
6.01.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.868.400.000,00	1.546.742.500,00	(321.657.500)
7.01.01.	KECAMATAN PADANG BARAT	2.442.120.000,00	2.382.120.000,00	(60.000.000)
7.01.02.	KECAMATAN PADANG TIMUR	2.496.120.000,00	2.442.120.000,00	(54.000.000)
7.01.03.	KECAMATAN PADANG UTARA	2.064.480.000,00	2.082.480.000,00	18.000.000
7.01.04.	KECAMATAN PADANG SELATAN	2.910.480.000,00	2.856.480.000,00	(54.000.000)
7.01.05.	KECAMATAN NANGGALO	2.155.200.000,00	2.194.302.000,00	39.102.000
7.01.06.	KECAMATAN KURANJI	2.675.640.000,00	2.622.240.000,00	(53.400.000)
7.01.07.	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	3.234.120.000,00	3.270.120.000,00	36.000.000
7.01.08.	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.902.480.000,00	1.902.480.000,00	-
7.01.09.	KECAMATAN PAUH	2.387.640.000,00	2.154.240.000,00	(233.400.000)
7.01.10.	KECAMATAN KOTO TANGAH	3.324.360.000,00	3.108.360.000,00	(216.000.000)
7.01.11.	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	1.613.400.000,00	1.479.240.000,00	(134.160.000)

Tabel 3.4
Belanja Hibah Pada PPAS Tahun 2019

KODE REK	URAIAN BELANJA	PPAS 2019
5:01:04	Belanja Hibah	50.469.216.800,00
5.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah	10.020.405.000,00
5.1.4.01.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah.	10.020.405.000,00
5.1.4.04.	Belanja Hibah kepada Masyarakat	32.500.811.800,00
5.1.4.04.01.	Belanja Hibah kepada Masyarakat.	32.500.811.800,00
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	7.948.000.000,00
5.1.4.05.01.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.	7.948.000.000,00

Tabel 3.5
Belanja Bantuan Sosial Pada PPAS Tahun 2019

KODE REK	URAIAN BELANJA	PPAS 2019
5:01:05	Belanja Bantuan Sosial	12.800.339.000,00
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan /atau Keluarga	12.426.339.000,00
5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan /atau Keluarga yang direncanakan.	1.621.834.620,00
5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan /atau Keluarga yang tidak direncanakan	10.804.504.380,00
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan	374.000.000,00
5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan.	374.000.000,00

Belanja Langsung sebesar Rp1.264.429.431.000,00 dialokasikan ke dalam :

1. **Belanja pegawai;** penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan. Sedangkan bagi Non PNS (pegawai tidak tetap) tetap mengacu kepada Standar Anggaran Biaya tersebut diatas dengan memperhatikan peran dan kontribusi serta terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan.
2. **Belanja Barang dan Jasa;** dibelanjakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, dimana pada setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan, ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Kebijakan penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan/atau dengan pihak ketiga.
3. **Belanja Modal;** ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 yang terkait dengan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan

pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset, juga mengenai Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan tahun jamak (*multi years*).

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Rencana Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2019
(dalam Rupiah)

KD REK	URAIAN	APBD 2018	PPAS 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
2	BELANJA DAERAH	2.387.533.525.597,00	2.467.078.908.818,00	79.545.383.221,00	3,33
2:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.199.370.272.642,00	1.202.649.477.818,00	3.279.205.176,00	0,27
2:01:01	BELANJA PEGAWAI	1.101.900.243.518,00	1.128.399.643.242,00	26.499.399.724,00	2,40
2:01:02	BELANJA BUNGA	5.130.000.000,00	7.470.135.052,00	2.340.135.052,00	45,62
2:01:04	BELANJA HIBAH	83.567.785.400,00	50.469.216.800,00	(33.098.568.600,00)	(39,61)
2:01:05	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6.883.934.620,00	12.800.339.000,00	5.916.404.380,00	85,95
2:01:07	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	888.309.104,00	888.309.104,00	0,00	0,00
2:01:08	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	2.621.834.620,00	1.621.834.620,00	162,18
2:02	BELANJA LANGSUNG	1.188.163.252.955,00	1.264.429.431.000,00	76.266.178.045,00	6,42
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(59.658.746.097,00)	(3.788.999.818,00)		0,00

3.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Belanja Daerah Menurut Indikasi Program

Prioritas Program Belanja Daerah PPAS 2019 merupakan prioritas kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Tahun 2019. Pertimbangan dalam penetapan prioritas mengacu kepada kondisi daerah, konsistensi dan sinkronisasi prioritas pembangunan mulai dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Sasaran Pembangunan Kota Padang Tahun 2019. Selain itu,

prioritas yang disusun adalah melanjutkan pelaksanaan program Tahun 2018 dan merupakan penuntasan target-target pembangunan sebelumnya.

Mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran Kota Padang Tahun 2019, Prioritas Pembangunan Kota Padang untuk Tahun 2019 lebih difokuskan kepada:

1. Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi.

Prioritas ini diarahkan pada penyelesaian dan optimalisasi pembangunan Pasar Raya Padang dan Revitalisasi pasar-pasar pembantu.

2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

Prioritas ini diarahkan pada pemerataan akses pendidikan, penyelenggaraan pendidikan gratis di tingkat SD, SMP sederajat, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan olahraga yang berkualitas.

3. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan transportasi kota.

Prioritas ini diarahkan sebagai penunjang operasional penyediaan terminal, serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik. Selain itu juga difokuskan pada persiapan untuk menciptakan Kota Padang sebagai Smart City melalui peningkatan teknologi informasi serta menjalin kerjasama regional dan internasional.

4. Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

Prioritas ini diarahkan pada penyelesaian revitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan.

5. Penataan dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan.

Prioritas ini diarahkan untuk melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air.

6. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Prioritas ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana, prasarana dan infrastruktur rumah sakit maupun puskesmas, serta penyediaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat Kota Padang terutama bagi balita dan masyarakat miskin dan terlantar. Pelayanan kesehatan terus ditingkatkan dan kedepannya dalam bentuk BLUD pada RSUD dan Puskesmas.

7. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.

Prioritas ini diarahkan untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni dan pemberian santunan kematian 1 juta untuk warga kurang mampu Kota Padang, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mencetak wirausaha baru di kota Padang.

8. Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana.

Prioritas ini diarahkan pada penataan Kota Padang menjadi Padang Bersih dan Padang Terang dengan berbasiskan mitigasi bencana.

9. Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik.

Prioritas ini diarahkan pada penyediaan sarana prasarana pemerintahan, penyediaan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS, peningkatan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT dan garin masjid/mushalla.

10. Pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya, prioritas dan diarahkan pada pelaksanaan pesantren Ramadhan, kegiatan keagamaan, seni dan budaya.

Prioritas dan diarahkan pada pelaksanaan pesantren Ramadhan, kegiatan keagamaan, seni dan budaya.

Tabel 3.7
Alokasi Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Padang

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	%
1	Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan Kota dan Sentra Ekonomi	25.974.345.515,00	2,06
2	Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan	209.536.506.150,00	16,64
3	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Transportasi Kota	208.508.916.010,00	16,56
4	Pengembangan Industri Pariwisata dan Kelautan serta Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing	16.469.183.350,00	1,31
5	Penataan dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan	150.290.714.875,00	11,93
6	Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	111.814.432.258,00	8,88

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	%
7	Pembangunan Ekonomi Berbasis Masyarakat dan Mendorong Tumbuhnya Investasi Daerah dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	59.596.072.131,00	4,73
8	Penataan Lingkungan Perkotaan yang Hijau, Berkelanjutan dan Berbasis Mitigasi Bencana	50.049.668.186,00	3,97
9	Peningkatan Penataan Birokrasi dan Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih untuk Peningkatan Pelayanan Publik	407.367.948.525,00	31,95
10	Pengamalan Agama dalam Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya	24.821.594.000,00	1,97
	JUMLAH	1.264.429.431.000,00	100,00

Tabel 3.8
Alokasi Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019
Berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Alokasi Anggaran Belanja		Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	
1	2	3	4	5=3+4
1	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS SBK dalam kehidupan masyarakat	21.613.916.123,00	-	21.613.916.123,00
2	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	5.860.957.104,00	265.832.788.918,43	271.693.746.022,43
3	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan	181.468.444.850,00	630.477.511.170,29	811.945.956.020,29
4	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	176.099.978.478,00	122.601.871.952,40	298.701.850.430,40
5	Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis	2.286.500.000,00	15.276.704.926,80	17.563.204.926,80
6	Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, umkm dan peningkatan investasi	14.475.926.628,00	24.924.804.836,88	39.400.731.464,88
7	Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan	7.174.830.400,00	4.623.286.920,80	11.798.117.320,80
8	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	1.591.580.896,00	69.934.691.377,80	71.526.272.273,80
9	Pengembangan sumber	204.291.494.642,00	32.723.867.470,60	237.015.362.112,60

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Alokasi Anggaran Belanja		Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	
	energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur			
10	Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	14.788.666.779,00	36.253.950.244,00	51.042.617.023,00
	TOTAL	629.652.295.900	1.202.649.477.818,00	

Tabel 3.9
Alokasi Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita)	Program	Kegiatan	Rp	%
1.	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	37	247	386.445.162.037	68,30
2.	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	6	61	126.539.742.579	22,36
3.	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif	8	32	12.455.303.250	2,20
4.	Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan	3	32	2.706.500.000	0,48
5.	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	8	61	37.676.122.408	6,66

BAB IV
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM

4.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Berdasarkan Urusan dan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyusunan APBD Tahun 2019, memperkirakan target Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan kebutuhan dan keperluan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan pada masing-masing SKPD. Dalam PPAS 2019, PPAS tersebut sebesar Rp. 2.467.078.908.818,- untuk keperluan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.202.649.477.818,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.264.429.431.000,-. Komposisi Belanja Langsung menurut SKPD dapat dilihat dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Urusan SKPD
Tahun Anggaran 2019

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	114.954.443.449,00	792.180.697.607,89	2.365.697.973.069,00	3.157.878.670.676,89
1.01.	PENDIDIKAN	-	630.477.511.170,29	452.496.746.000,00	1.082.974.257.170,29
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	-	630.477.511.170,29	226.248.373.000,00	856.725.884.170,29
1.02.	KESEHATAN	85.332.143.449,00	122.601.871.952,40	252.794.004.524,00	375.395.876.476,40
1.02.01	DINAS KESEHATAN	48.800.000.000,00	97.115.584.117,40	70.597.269.647,00	167.712.853.764,40
1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	36.532.143.449,00	25.486.287.835,00	55.799.732.615,00	81.286.020.450,00
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26.880.000.000,00	13.407.938.903,40	513.479.480.102,00	526.887.419.005,40
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26.880.000.000,00	13.407.938.903,40	256.739.740.051,00	270.147.678.954,40
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.257.300.000,00	5.773.267.869,00	272.138.295.420,00	277.911.563.289,00
1.04.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.257.300.000,00	5.773.267.869,00	136.069.147.710,00	141.842.415.579,00
1.05.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.485.000.000,00	15.263.315.016,80	67.970.726.000,00	83.234.041.016,80
1.05.01	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1.485.000.000,00	6.178.257.419,80	12.274.027.000,00	18.452.284.419,80
1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	9.085.057.597,00	21.711.336.000,00	30.796.393.597,00
1.06.	SOSIAL	-	4.656.792.696,00	18.252.730.000,00	22.909.522.696,00

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1.06.01	DINAS SOSIAL	-	4.656.792.696,00	9.126.365.000,00	13.783.157.696,00
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	55.402.360.470,00	79.320.938.827,94	435.193.093.863,00	514.514.032.690,94
2.01.	TENAGA KERJA	-	5.465.100.452,80	13.436.687.092,00	18.901.787.544,80
2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	-	5.465.100.452,80	6.718.343.546,00	12.183.443.998,80
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	5.812.798.219,00	23.233.280.000,00	29.046.078.219,00
2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB	-	5.812.798.219,00	11.616.640.000,00	17.429.438.219,00
2.03.	KETAHANAN PANGAN	-	2.492.887.115,40	5.728.602.000,00	8.221.489.115,40
2.03.01	DINAS PANGAN	-	2.492.887.115,40	2.864.301.000,00	5.357.188.115,40
2.04.	PERTANAHAN	-	-	-	-
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	17.402.427.840,00	25.797.300.717,20	71.827.719.972,00	97.625.020.689,20
2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.402.427.840,00	25.797.300.717,20	35.913.859.986,00	61.711.160.703,20
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1.344.000.000,00	5.534.408.228,60	8.458.177.432,00	13.992.585.660,60
2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.344.000.000,00	5.534.408.228,60	4.229.088.716,00	9.763.496.944,60
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	-	-	-
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
2.09.	PERHUBUNGAN	29.847.932.630,00	13.542.660.698,20	57.305.254.000,00	70.847.914.698,20
2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	29.847.932.630,00	13.542.660.698,20	28.652.627.000,00	42.195.287.698,20
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.600.000.000,00	3.488.301.236,00	17.720.149.608,00	21.208.450.844,00
2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.600.000.000,00	3.488.301.236,00	8.860.074.804,00	12.348.376.040,00
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	4.396.819.051,04	21.583.932.000,00	25.980.751.051,04
2.11.01	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	4.396.819.051,04	10.791.966.000,00	15.188.785.051,04
2.12.	PENANAMAN MODAL	168.000.000,00	5.327.434.952,80	20.272.609.138,00	25.600.044.090,80
2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	168.000.000,00	5.327.434.952,80	10.136.304.569,00	15.463.739.521,80
2.13.	PEMUDA DAN OLAHRAGA	5.040.000.000,00	3.722.950.483,90	46.525.924.000,00	50.248.874.483,90

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	5.040.000.000,00	3.722.950.483,90	23.262.962.000,00	26.985.912.483,90
2.14.	STATISTIK	-	-	-	-
2.16.	KEBUDAYAAN	-	-	-	-
2.17.	PERPUSTAKAAN	-	3.740.277.673,00	4.036.394.000,00	7.776.671.673,00
2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	3.740.277.673,00	2.018.197.000,00	5.758.474.673,00
2.18.	KEARSIPAN	-	-	-	-
3.	URUSAN PILIHAN	29.928.000.071,00	32.605.655.565,24	240.055.083.543,00	272.660.739.108,24
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.368.000.000,00	4.623.286.920,80	19.752.874.292,00	24.376.161.212,80
3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.368.000.000,00	4.623.286.920,80	9.876.437.146,00	14.499.724.066,80
3.02.	PARIWISATA	3.600.000.000,00	4.511.063.360,00	18.138.262.000,00	22.649.325.360,00
3.02.01	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3.600.000.000,00	4.511.063.360,00	9.069.131.000,00	13.580.194.360,00
3.03.	PERTANIAN	1.260.000.000,00	12.783.817.811,40	46.391.862.040,00	59.175.679.851,40
3.03.01	DINAS PERTANIAN	1.260.000.000,00	12.783.817.811,40	23.195.931.020,00	35.979.748.831,40
3.04.	KEHUTANAN	-	-	-	-
3.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-
3.06.	PERDAGANGAN	20.700.000.071,00	10.687.487.473,04	75.753.724.030,00	86.441.211.503,04
3.06.01	DINAS PERDAGANGAN	20.700.000.071,00	10.687.487.473,04	37.876.862.015,00	48.564.349.488,04
3.07.	PERINDUSTRIAN	-	-	-	-
3.08.	TRANSMIGRASI	-	-	-	-
4.	PENUNJANG URUSAN	2.263.005.105.010,00	157.323.869.490,23	222.943.334.550,00	380.267.204.040,23
4.01.	PENGAWASAN	-	7.110.402.263,00	12.734.926.600,00	19.845.328.863,00
4.01.01	INSPEKTORAT	-	7.110.402.263,00	6.367.463.300,00	13.477.865.563,00
4.02.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	-	5.480.407.697,60	22.819.718.000,00	28.300.125.697,60
4.02.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	5.480.407.697,60	11.409.859.000,00	16.890.266.697,60
4.03.	ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	2.263.005.105.010,00	139.220.078.936,23	96.044.979.100,00	235.265.058.036,23
4.03.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.682.169.865.965,00	104.983.412.618,42	28.010.628.995,00	132.994.041.613,42
4.03.03	BADAN PENDAPATAN DAERAH	580.835.239.045,00	34.236.666.317,81	20.011.860.555,00	54.248.526.872,81
4.04.	KEPEGAWAIAN	-	5.512.980.593,40	17.029.266.000,00	22.542.246.593,40
4.04.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	-	5.512.980.593,40	8.514.633.000,00	14.027.613.593,40
4.05.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-
4.06.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-
5.	PENDUKUNG	-	48.414.139.843,20	343.179.736.299,00	391.593.876.142,20

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
5.01.	SEKRETARIAT DAERAH	-	19.525.334.945,20	129.158.777.966,00	148.684.112.911,20
5.01.01	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	-	1.082.993.485,40	-	1.082.993.485,40
5.01.02	SEKRETARIAT DAERAH	-	18.442.341.459,80	64.579.388.983,00	83.021.730.442,80
5.02.	SEKRETARIAT DPRD	-	28.888.804.898,00	99.627.712.900,00	128.516.517.798,00
5.02.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	23.278.558.925,00	-	23.278.558.925,00
5.02.02	SEKRETARIAT DPRD	-	5.610.245.973,00	49.813.856.450,00	55.424.102.423,00
6.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	6.575.540.521,00	35.416.843.932,00	41.992.384.453,00
6.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	6.575.540.521,00	23.611.229.288,00	30.186.769.809,00
6.01.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	2.297.148.414,00	4.405.206.690,00	6.702.355.104,00
6.01.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	4.278.392.107,00	7.400.407.954,00	11.678.800.061,00
7.	KEWILAYAHAN	-	86.228.635.962,50	150.802.227.744,00	237.030.863.706,50
7.01.	KEWILAYAHAN	-	86.228.635.962,50	100.534.818.496,00	186.763.454.458,50
7.01.01	KECAMATAN PADANG BARAT	-	7.466.991.409,80	4.238.577.150,00	11.705.568.559,80
7.01.02	KECAMATAN PADANG TIMUR	-	8.166.668.004,00	5.260.239.000,00	13.426.907.004,00
7.01.03	KECAMATAN PADANG UTARA	-	6.794.274.110,80	3.840.874.825,00	10.635.148.935,80
7.01.04	KECAMATAN PADANG SELATAN	-	8.895.779.122,70	5.257.405.296,00	14.153.184.418,70
7.01.05	KECAMATAN NANGGALO	-	7.159.293.066,00	3.687.505.488,00	10.846.798.554,00
7.01.06	KECAMATAN KURANJI	-	8.786.772.841,00	4.766.417.372,00	13.553.190.213,00
7.01.07	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	-	11.054.908.058,40	6.290.322.417,00	17.345.230.475,40
7.01.08	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	-	6.110.951.112,20	3.320.647.000,00	9.431.598.112,20
7.01.09	KECAMATAN PAUH	-	7.053.646.927,40	3.655.688.200,00	10.709.335.127,40
7.01.10	KECAMATAN KOTO TANGAH	-	10.294.488.153,40	6.554.087.000,00	16.848.575.153,40
7.01.11	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	-	4.444.863.156,80	3.395.645.500,00	7.840.508.656,80
	Jumlah	2.463.289.909.000,00	1.202.649.477.818,00	1.264.429.431.000,00	2.467.078.908.818,00

Target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir.

4.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Belanja Pegawai, Bunga Pinjaman, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019, penetapan Plafon Anggaran Sementara bagi keperluan Pegawai, Pembayaran Bunga Pinjaman, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, termasuk dalam kelompok kategori Belanja Tidak Langsung, sebagaimana uraian berikut ini:

1. **Belanja Pegawai;** besarnya belanja pegawai disesuaikan dengan penganggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempertimbangkan rencana pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya, serta kenaikan penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang nantinya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam PPAS 2019 ditargetkan Belanja Pegawai sebesar 1,128 Trilyun rupiah.
2. **Belanja Bunga Pinjaman;** kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam PPAS 2019 pembayaran bunga pinjaman kepada PT.SMI dialokasikan sebesar 7,47 Milyar rupiah.
3. **Belanja Hibah;** belanja daerah ini mengacu kepada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan bagi penerima hibah dalam pelaksanaan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Dalam PPAS 2019 dianggarkan sebesar 54,46 Milyar rupiah.
4. **Belanja Bantuan Sosial;** belanja daerah ini mengacu kepada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan bagi instansi penerima dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan Menteri Keuangan. Dalam APBD Tahun 2019 dianggarkan belanja ini sebesar 12,80 Milyar rupiah.
5. **Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;** belanja ini bersumber dari pendapatan provinsi yang diberikan kepada kabupaten dan kota serta pemerintah daerah lainnya. Dalam PPAS 2019 anggaran sementara sebesar 888,309 Juta rupiah.
6. **Belanja Tak Terduga;** jumlah belanja ini dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2017 dan kondisi yang terjadi pada tahun 2018. Pada PPAS 2019 ditetapkan Belanja Tidak Terduga sebesar 2,621 Milyar rupiah.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Bunga, dan Subsidi
Kota Padang Tahun 2019 (dalam Rupiah)

KD REK	URAIAN	APBD 2018	PPAS 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
2:01:01	BELANJA PEGAWAI	1.101.900.243.518,00	1.128.399.643.242,00	26.499.399.724,00	2,40
2:01:02	BELANJA BUNGA	5.130.000.000,00	7.470.135.052,00	2.340.135.052,00	45,62
2:01:04	BELANJA HIBAH	83.567.785.400,00	50.469.216.800,00	(33.098.568.600,00)	(39,61)
2:01:05	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6.883.934.620,00	12.800.339.000,00	5.916.404.380,00	85,95
2:01:07	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	888.309.104,00	888.309.104,00	0,00	0,00
2:01:08	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	2.621.834.620,00	1.621.834.620,00	162,18

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah dapat dikelompokkan atas 2 komponen, yaitu: (a) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah: dan (b) Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam RKPD Tahun 2019 meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah diberi kewajiban untuk membayar kembali. Kebijakan ini dilakukan untuk menutup defisit ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran. Komponen penerimaan pembiayaan ini terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Penerimaan, Penerimaan Piutang Daerah. Pada tahun 2019 kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah ini mencakup:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SILPA)
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2019 jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah keseluruhan mencapai 50,00 Milyar rupiah. Besarnya penerimaan pembiayaan daerah tahun 2019 adalah mengingat kondisi daerah dan tidak semua penerimaan pembiayaan dapat dilaksanakan, karena berbagai program dan kegiatan yang ditunda khususnya dalam peningkatan efisien penyelenggaraan pemerintahan. Penerimaan ini berasal dari SILPA tahun 2018 sekitar 50 Milyar rupiah.

5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa kebijakan pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari seluruh jumlah jenis pengeluaran pembangunan pada jenis pengeluaran pembiayaan yang berkenaan. Sama halnya dengan penerimaan pembiayaan daerah, dalam pengeluaran pembiayaan

merupakan penjumlahan dari seluruh objek pengeluaran dalam tahun anggaran sedang berjalan.

Komponen pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Investasi, Pembayaran Pokok Hutang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pembayaran Hutang Pihak Ketiga. Pada PPAS Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan Daerah ini mencakup komponen pengeluaran, yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Pembiayaan Pengeluaran Daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam anggaran ini meliputi semua transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari seluruh jumlah jenis pengeluaran pembangunan pada jenis pengeluaran pembiayaan yang berkenaan.

Dalam PPAS tahun 2019 untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah berjumlah 51,21 Milyar rupiah yaitu berupa penyertaan modal (investasi) Pemda pada PDAM Kota Padang dan Bank Nagari. Untuk jelasnya tentang Pembiayaan Daerah ini dapat dilihat Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Plafon Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah)

KD REK	URAIAN	APBD 2018	PPAS 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
3	PEMBIAYAAN DAERAH	59.658.746.097,00	3.788.999.818,00	(55.869.746.279,00)	(93,65)
3:01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.508.746.097,00	50.000.000.000,00	(50.508.746.097,00)	(50,25)
3:01:01	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	100.508.746.097,00	50.000.000.000,00	(50.508.746.097,00)	(50,25)
3:01:04	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH	0,00	0,00	0,00	
3:02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	40.850.000.000,00	46.211.000.182,00	5.361.000.182,00	13,12
3:02:02	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
	BANK NAGARI	0	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	PDAM	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	0)
	PADANG SEJAHTERA MANDIRI	5.000.000.000,00	0	(5.000.000.000,00)	(100,00)
3:02:03	PEMBAYARAN POKOK HUTANG	20.850.000.000,00	26.211.000.182,00	5.361.000.182,00	25,71
	PEMBIAYAAN NETO	59.658.746.097,00	3.788.999.818,00	(55.869.746.279,00)	(93,65)
3,3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	

BAB VI P E N U T U P

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa terdapat keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sistem Anggaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Sistem Anggaran merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan dan sistem anggaran.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019 yang mengharuskan kepada Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang mengacu kepada RKPD, dimana KUA dijadikan dasar dan acuan penyusunan PPAS. Oleh karena itu, PPAS Tahun 2019 merupakan tindak lanjut dari pada KUA Tahun 2019 yang disepakati antara Pemko Padang dan DPRD Kota Padang melalui Nota Kesepakatan bersama tentang PPAS.

PPAS Tahun 2019 memberikan informasi tentang Program Prioritas Pembangunan Daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai Satuan Kerja Perangkat (SKPD). Plafon Anggaran Sementara ini akan menjadi Pagu Definitif yang selanjutnya akan dibahas lagi antara Pemerintah Kota Padang dengan DPRD Kota Padang yang masih bisa tetap, bergeser, berkurang dan bertambah sesuai dengan kesepakatan didalam pembahasan RAPBD 2019. Dan selanjutnya plafon anggaran tersebut akan dialokasikan kepada masing-masing SKPD dalam rangka melaksanakan urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian, PPAS Tahun 2019 memberikan informasi tentang PPAS yang memuat prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan terkait serta alokasi untuk setiap program/kegiatan SKPD sesuai urusan masing-masing SKPD. Selanjutnya PPAS digunakan sebagai acuan bagi masing-masing SKPD dalam penyusunan RKA Tahun 2019.

Terima Kasih

Padang, Juli 2018